

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekarang pandemi Covid-19 tengah merajalela di seluruh belahan dunia dan kasus pertama pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia ialah pada tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan secara langsung oleh bapak Presiden Joko Widodo (Dwianto, 2021). Untuk menangani kasus pandemi Covid-19 ini Kementerian Kesehatan RI memberikan izin kepada pemerintahan pada tahun 2020 untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Kedutaan Besar Republik Indonesia Paris Prancis, 2020) dan pada tahun 2021 memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dimulai sejak 11 Januari hingga 25 Januari 2021 (Azanella, 2021) dan diperpanjang hingga 19 April 2021 (Hutabarat, 2021).

Pembatasan kegiatan ini memiliki 8 pengaruh negatif bagi perekonomian Indonesia yaitu terdapat karyawan di PHK dan dirumahkan, *Purchasing Manager Index* Indonesia berada sebesar 45.3 pada maret 2020, penerbangan domestik dan internasional pada januari hingga februari 2020 telah dibatalkan di 15 bandara, sektor penerbangan mengalami kerugian berkisar Rp 207 miliar, angka turis mengalami penurunan hingga 6.800 per hari, Organisasi PHRI memprediksi akan terjadinya penurunan pengguna hotel dan penurunan jumlah pengunjung restoran, impor Indonesia yang menurun dan inflasi maret 2020 mencapai 2,96% (Santoso, 2020). Dari kedelapan dampak negatif tersebut, terdapat beberapa hal yang saling

berkaitan dan dapat membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan, yaitu mengenai penurunan angka turis yang memberikan dampak pada penurunan tingkat penggunaan hotel dan pengunjung restoran di Indonesia.

Kementerian Keuangan melaporkan PAD hingga 31 Oktober mengalami kemerosotan hingga Rp 33,88 Triliun (Fauzia, 2020). Kemerosotan PAD disebabkan oleh penurunan salah satu sumber penerimaan daerah (penerimaan pajak daerah) seperti pajak restoran, pajak hotel dan pajak hiburan yang mengalami penurunan akibat pengunjung hotel dan restoran menurun, namun tidak hanya itu saja kawasan wisata pun turut merasakan sepi pengunjung (Pradana, 2020). Menurut Tahwin (2013) jika wisatawan yang berkunjung ke daerah mengalami peningkatan maka akan semakin banyak pula jumlah uang yang akan wisatawan keluarkan untuk membiayai kepentingan pribadi seperti penginapan hotel maupun makan di restoran yang membuat PAD menjadi meningkat.

Kabupaten Bandung Barat yang berada di Provinsi Jawa Barat turut mengalami penurunan PAD ialah Kabupaten Bandung Barat (Gunawan, 2020). Hal ini dibuktikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat yang menyebutkan data potensi penerimaan pajak daerah yang bocor tahun 2020 mencapai Rp8,4 miliar (Setiawan, 2020).

Kabupaten Bandung Barat (KBB) ialah salah satu daerah yang bisa mendapatkan penerimaan pajak daerah yang cukup tinggi, karena daerah ini terkenal dengan sektor pariwisata, yang mana sektor pariwisata di KBB merupakan penyumbang PAD yang cukup besar (Nizar, 2021). Kabupaten Bandung Barat

memiliki banyak sekali tempat wisata yang cukup dikenal oleh wisatawan dari berbagai daerah, maka dari itu wisatawan yang datang ke Bandung akan merasa belum lengkap jika tidak berkunjung ke Lembang atau daerah wisata yang berada di KBB (Atmanasayu, 2019).

Penelitian Wenur et al. (2018) mengatakan bahwa selama periode 2013 hingga 2017 kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD Kota Bitung mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 40,98%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bitung rata-ratanya sudah cukup baik walau masih di bawah 50%. Efektivitas pajak daerah Kota Bitung berfluktuasi bila dilihat dari hasil pengujian tahun 2013 hingga 2017 dengan rata-rata sebesar 115,49%. Pemungutan pajak daerah Kota Bitung sudah cukup efektif jika dilihat dari rata-rata efektivitasnya, karena sudah melebihi 100% dari target pajak daerah.

Penelitian Octovido et al. (2014) mengatakan bahwa efektivitas di Kota Batu memperlihatkan ditahun 2010 memiliki tingkat efektivitas yang paling rendah dibandingkan tahun yang diuji. Hal itu dikarenakan pada tahun 2010 belum maksimal untuk melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah Kota Batu. Hasil analisis kontribusi paling rendah ditemui pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun-tahun lain yang di uji. Hal itu terjadi karena Kota Batu hanya memiliki sedikit objek pajak dan potensi pajak pada tahun 2009.

Penelitian Arditia (2013) mengatakan bahwa kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah terhadap PAD Kota Surabaya berkisar diantara satu hingga diatas duapuluh persen karena masing-masing jenis pajak daerah berada

dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang. Untuk efektivitas pajak daerah termasuk dalam kategori kurang efektif, cukup efektif, efektif dan sangat efektif.

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Saat masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat”. Penelitian ini perlu dilakukan untuk membandingkan efektivitas dari masing-masing jenis pajak daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 dan membandingkan kontribusi dari masing-masing jenis pajak daerah terhadap PAD sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah disampaikan maka dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas masing-masing jenis pajak daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui efektivitas masing-masing jenis pajak daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.
2. Mengetahui besaran kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum dan saat masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Bandung Barat dalam mempertahankan jenis pajak yang memberikan kontribusi besar dan menangani jenis pajak yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk ditingkatkan dalam situasi pandemi saat ini.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang membahas mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber PAD.